

Jakarta Diminta Hentikan Reklamasi Pantai Utara

Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J), Walhi Jakarta, dan OneWorld-Indonesia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang bahkan membatalkan proyek reklamasi Pantura Jakarta yang akan dimulai tahun 2009 mendatang. Mereka menilai, Jakarta sudah tidak mampu menerima adanya penambahan kawasan komersial baru.

"Pemprov DKI Jakarta harus segera duduk bersama dengan DPRD dan para pihak lainnya guna membahas persoalan reklamasi Pantura Jakarta dari prespektif tata ruang wilayah yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi dan sosial. Pemprov DKI Jakarta harus mulai berani membatasi pengaruh para juragan properti yang ingin tetap menancapkan bisnisnya melebihi daya dukung ekologi dan sosial kota ini," tutut Firdaus Cahyadi dari OneWorld-Indonesia melalui siaran pers yang diterima *Jurnal Nasional*, di Jakarta, kemarin (21/7).

Menurutnya, rencana revitalisasi lingkungan dengan tetap mengizinkan reklamasi pantai untuk kawasan komersial dan hunian mewah di Jakarta, dipastikan tidak akan mampu mengatasi dampak sosial dan lingkungan. Pasalnya, pembangunan kawasan komersial tersebut akan semakin menjadikan kota ini sebagai daerah tujuan urbanisasi. Akibatnya, problem sosial dan ekologi di kota ini semakin sulit dipecahkan.

Salah satu problem ekologi yang segera muncul dari meledaknya urbanisasi di Jakarta adalah bertambahnya volume sampah di kota ini. Menurut Walhi, kota Jakarta pada tahun 1985 menghasilkan sampah sejumlah 18.500 m³ per hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 m³ per hari. Jika dihitung dalam setahun, maka volume sampah tahun 2000 mencapai 170 kali besar Candi Borobudur (volume Candi Borobudur = 55.000 m³). Volume itu dipastikan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya manusia yang ada di Jakarta.

Bukan hanya sampah, penambahan kawasan komersial juga akab berdampak pada kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Selain itu, proyek tersebut hanya akan mengubur mimpi Jakarta untuk dapat mengatasi banjir yang terjadi pada musim hujan dan yang disebabkan oleh air pasang laut.

Data dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menyebutkan bahwa aktivitas pembangunan kota selama ini telah menyebabkan dari 2.000 juta per meter kubik air hujan yang turun di Jakarta tiap tahun, hanya 26,6 persen yang terserap dalam tanah. Sementara itu, sisanya, 73,4 persen, menjadi air larian (*run off*) yang berpotensi menimbulkan banjir di perkotaan.